

INTISARI

Kritik dan perbaikan terhadap pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran yang sifatnya tradisional menuju ke arah *emerging paradigm* pada organisasi sektor publik terus dilakukan. Perubahan ini dilakukan agar perhatian utama dalam pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran tidak hanya diarahkan pada pengukuran secara umum namun juga secara unik. Ukuran umum merupakan ukuran yang dipergunakan oleh mayoritas organisasi dalam melakukan pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran, sedangkan ukuran unik merupakan ukuran yang hanya dipergunakan oleh organisasi tertentu yang memiliki pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran yang sifatnya spesifik.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan organisasi sektor publik yang menggunakan ukuran umum dan unik dalam pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggarannya. Hambatan penerapan konsep *emerging paradigm* dalam organisasi sektor publik seperti RSUD adalah konsep dan pemikiran untuk senantiasa menyerap habis anggaran yang telah diberikan dalam menjalankan kegiatan organisasi. Penyerapan tersebut sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran. Hambatan lain dalam penerapan konsep ini yaitu pengetahuan para pengambil keputusan dalam hal ini pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengambilan keputusan dan rencana alokasi anggaran. Anggota DPRD dimungkinkan terkendala bagaimana pengambilan keputusan harus diambil dan fokus permasalahan yang harus menjadi perhatian untuk menghasilkan pengambilan keputusan dengan baik.

Fenomena di atas mengarahkan kepada perumusan masalah belum fokusnya perhatian pimpinan dan anggota DPRD sebagai pengambil keputusan terhadap pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran terutama dalam konteks RSUD serta masih diragukannya pengetahuan yang dimiliki oleh pengambil keputusan berpengaruh terhadap keputusan yang dihasilkan.

Subjek dalam disertasi ini kelompok anggota DPRD dari empat kabupaten yaitu Cilacap, Brebes, Purbalingga, dan Banyumas. Jumlah anggota DPRD yang menjadi subjek adalah seratus orang yang terdiri dari duapuluh delapan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, tigapuluh enam

anggota DPRD Kabupaten Brebes, enam belas anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dan dua puluh anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kelompok yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan dalam pengambilan keputusan penilaian kinerja dan rencana alokasi anggaran RSUD, baik ketika menggunakan informasi umum maupun unik. Kelompok anggota DPRD yang berpengetahuan cenderung memberikan penilaian kinerja dan rencana alokasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota DPRD yang tidak berpengetahuan. Anggota DPRD yang berpengetahuan berhasil menggunakan informasi yang dimilikinya dengan memberikan penilaian kinerja dan rencana alokasi anggaran yang lebih rendah ketika menggunakan informasi unik dibandingkan ketika menggunakan informasi umum.

Disertasi ini memberikan kontribusi teoretis untuk mengatasi adanya senjangan dalam penelitian sebelumnya dengan melakukan elaborasi teori *bounded rationality concept, judgement heuristic approach, cognitive bias* dan *knowledge acquisition* serta penelitian sebelumnya dalam bidang sektor publik dan sektor privat.

Kontribusi metodologis berhasil disumbangkan dalam disertasi ini. Penelitian yang mengaitkan antara metoda eksperimen dalam organisasi sektor publik seperti DPRD masih belum banyak dihasilkan. Penggunaan anggota DPRD sebagai subjek eksperimen juga belum banyak dilakukan. Metoda eksperimen mempunyai kekuatan dari segi validitas internal, sehingga sumbangsih disertasi ini dapat menambah penelitian pada ranah akuntansi sektor publik.

Kontribusi kebijakan/praktis merupakan kontribusi terakhir dalam disertasi ini. Eksperimen yang dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan penjelasan singkat kepada anggota DPRD berhasil merubah anggota DPRD yang sebelumnya memberikan penilaian pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran lebih tinggi menjadi lebih berhati-hati berkat pengetahuan akan informasi umum dan unik yang dimilikinya.

Kata kunci: *Emerging Paradigm*, Organisasi Sektor Publik, Pengukuran Kinerja, Rencana Alokasi Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Critiques and improvements to traditional performance measurement and budget allocation plan leading to emerging paradigm in public sectors are continued to be made. This change is made so that the main concern in performance measurement and budget allocation plan are not only directed at the common measure, but also unique measure. Common measure is a measure used by the majority of organizations in conducting performance measurement and budget allocation plan, while the unique measure is a measure that is only used by certain organizations that have performance measurement and specific budget allocation plan.

Regional General Hospital (RSUD) is a public sector organization that uses common and unique measure in performance measurement and budget allocation plan. The obstacle to the implementation of the emerging paradigm concept in public sector organizations such as RSUD was the concepts and ideas to constantly absorb depleted budget that has been given in the course of the organizational activities. The absorption was often performed without considering performance measurement and budget allocation plan. Another obstacle in the implementation of this concept was the knowledge of decision makers, in this case was leadership and Regional Representative Members (DPRD) in making the decisions and budget allocation plan. Regional Representative Members were possibly constrained on how the decisions should be taken and the focus of the problem that should be concerned to produce good decisions.

This phenomenon led to the problem statement of attention of leaders and Regional Representative Members as the decision makers that have not been focus on performance measurement and budget allocation plan, especially in the context of RSUD and the knowledge gained by the decision makers to take the decisions was still doubted.

Subjects in this dissertation were group of Regional Representative Members from the four districts of Cilacap, Brebes, Purbalingga, and Banyumas. The total number of Regional Representative Members as subject was one hundred people consisting of twenty eight from Cilacap, thirty six from Brebes, sixteen from Purbalingga, and twenty from Banyumas.

The research result indicated that there were differences between the group of subject with knowledge and group of subject without knowledge in taking the decisions of performance assessment and budget allocation plan of RSUD, either when using common information or unique information. A group of Regional Representative Members who had the knowledge tended to provide lower performance assessment and budget allocation plan

than group of Regional Representative Members who did not have the knowledge. Regional Representative Members who had the knowledge successfully used the information by providing lower performance assessment and budget allocation plan when using the unique information than when using common information.

This dissertation provided theoretical contributions to overcome the difference in previous research by elaborating the theory of bounded rationality concept, judgment heuristic approach, cognitive bias and knowledge acquisition as well as previous research in the field of public sector and private sector.

The methodological contributions had successfully contributed in this dissertation. The research that links between experimental methods in public sector such as DPRD is still not widely conducted. The use of members of DPRD as the experimental subjects has also not much been conducted. The experimental method had strengths in terms of internal validity, so that the contribution of this dissertation can enrich to research in the area of public sector accounting.

The contribution of policy/practical was the latest contribution in this dissertation. The experiments carried out through a series of training and briefing to Regional Representative Members had successfully changed Regional Representative Members who previously provided a higher assessment of performance measurement and budget allocation plan to be more attentive because of the knowledge of common and unique information that they had.

Keywords: Emerging Paradigm, Public Sector Organization, Performance Measurement, Budget Allocation Plan, Regional House of Representatives.